

TINGKAT PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI LUMBUNG PANGAN KABUPATEN SIDRAP

Misbahuddin*)

***Abstract :** This study aims to determine the level of unemployment and poverty in the Food Barn Sidrap, which is based on research that has been done found that the magnitude of the population is still poor and the unemployed who live in rural districts Sidrap particular region, making the agricultural sector as a key sector, development, productivity and quality of the agricultural sector is the second thing that must be addressed so that the agricultural sector is a mainstay of overcoming poverty and unemployment in rural areas. Need a comprehensive master plan and road map of the relevant institutions to raise the productivity and quality of the agricultural sector, the area of productive agricultural land that tapers reduce productivity. Agrarian Reform Law to be done. Compensation for productive land transition should correlate to increased agricultural productivity, fertilizer subsidies and other saparodi should improve productivity. Efficient implementation and efektififit should continue to be pursued, productivity and quality of land limitations can be overcome with a budget of Research and Development of Agriculture found the variant products, production systems, marketing, and industrial agriculture. Agricultural investment should be encouraged, importance of agriculture to economic growth, poverty, and unemployment in the district Sidrap, need intensive monitoring for program planning and implementation of agricultural programs by relevant agencies so that timely achievement of the target.*

***Keywords:** Unemployment and Poverty*

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensi, atau dikenal dengan istilah Meta Masalah (masalah diatas segala masalah) dimana penyebabnya bukan hanya masalah ekonomi karena kekurangan keuangan akibat rendahnya pendapat yang berkaitan dengan kemampuan membeli barang dan jasa. Amartya Sen berpendapat bahwa kemiskinan disebabkan oleh bebrapa factor antara lain keterbatasan kapasitas (kemampuan), keterbatasan peluang atau kesempatan dan kebebasan.

Professor Nancy Peluso berkebangsaan Amerika Serikat dalam bukunya “ Rice Forests, Poor People” yang berisi paradoks pembangunan sektor pertanian bidang kehutanan terutama di Pulau Jawa. Manfaat Ekologi dan Ekonomi yang cukup besar dapat dihasilkan di sektor pertanian bidang kehutanan ini telah dapat mengangkat harkat kehidupan dan derajat sebagian elit politik dan elit

ekonomi bahkan memberi kontribusi yang sangat besar pada devisa dan neraca pembayaran serta pembayaran utang luar negeri Indonesia. Akan tetapi kontribusi manfaat besar itu sama sekali tidak di nikmati sekitar masyarakat yang mendiami wilayah hutan dan sekitarnya, bahkan justru sering menimbulkan permasalahan akibat buruknya model kebijakan, regulasi dan kelembagaan. Masyarakat disekitar hutan masih tetap terjerat kesenjangan, kemiskinan dan kemeralatan serta keterbelakangan.

Uraian analogi diatas dijumpai dan terjadi dalam hal yang sama disektor pertanian di Indonesia, Yang memiliki potensi ekonomi dan sumberda yang sangat berlimpah, tetapi petaninya yang merupakan konsituten terbesar masih terajad dan terjebak dalam kemiskinan struktural.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) ketika menyampaikan sambutan

pada Konfrensi Dewan Ketahanan Pangan di Istanana negara (2005) menyebutkan bahwa 5 5 persen penduduk miskin adalah petani dan 75 persen dari petani miskin itu petani tanaman pangan.

Kabupaten Sidrap sebagai bagian wilayah provinsi Sulawesi Selatan dikenal dengan sentra produksi beras diluar pulau Jawa, dimana surplus produksi beras tahun 2012 diats 200 ribu ton. Kabupaten Sidrap memiliki jumlah penduduk sekitar 252.483 terdiri atas perempuan 128.337, dan 124.146 laki – laki dan jumlah penduduk miskin (memperoleh jatah beras raskin) sekitar 17.754 jiwa (2013), 16.690 (2012) dan jumlah pengangguran terbuka menacapai 8.722 jiwa kenyataan semakin bertambah penduduk miskinnya dari tahun ketahun. Apalagi bila indikator yang digunakan standar baru dari Bank Dunia. Kenyataan ini apa ada korelasinya diakibatkan kenaikan harga beras, subsidi pertanian dikurangi atau lahan pertanian semakin sempit akibat sebagai lahan pertanian (sawah) di jadikan perumahan atau petani di Kabupaten Sidrap mampu meningkatkan produktivitasnya tapi belum melakukan efisiensi usahatani serta menerapkan sistem agribisnis secara holistik.

Pengertian Kemiskinan

Beberapa pengertian kemiskinan dijelaskan dibawah ini :

1. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002:3).
2. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty threshold). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo

kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, 2002:4).

3. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (SMERU dalam Suharto dkk, 2004).
4. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (Depsos, 2001).
5. Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi: (a) modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan), (b) sumber keuangan (pekerjaan, kredit), (c) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial), (d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa, (e) pengetahuan dan keterampilan, dan (f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Friedman dalam Suharto, dkk.,2004:6).

Dimensi Kemiskinan

David Cox (2004:1-6) membagi kemiskinan kedalam beberapa dimensi:

- a. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang

dan pengkalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi

- b. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
- c. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
- d. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar diri miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Menurut SMERU (2001), dimensi kemiskinan sebagai berikut :

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan)
- b. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- c. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
- d. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
- e. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.
- f. Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat.
- g. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan
- h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
- i. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak telantar, wanita korban

tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpinggirkan)(Suharto, dkk, 2004:7-8).

Indikator Kemiskinan

Setelah menjadi menjadi sebuah perdebatan publik, Bank Dunia secara resmi mengeluarkan hasil kajian tentang kemiskinan di Indonesia. Kajian yang menghasilkan estimasi jumlah orang miskin hampir 109 juta (49 persen) sedangkan BPS hanya mengeluarkan data kemiskinan sekitar 35 juta jiwa. Dari data tersebut Bank Dunia merekomendasikan saran-saran pada pemerintah supaya lebih serius melaksanakan strategi revitalisasi pada sektor pertanian.

Hal yang menarik dari data Bank Dunia tersebut, sumber kontroversi bukan tentang ukuran dan indikator garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia sebesar 2 Dollar AS perhari, akan tetapi melainkan tentang keterkaitan kemiskinan dengan perubahan kenaikan harga beras dan kemiskinan karena karakter komoditas beras sebagai hajat hidup penduduk Indonesia dan umumnya masyarakatnya hidup dalam sector pertanian.

Dengan ukuran yang baru tersebut kemiskinan di Indonesia menjadi jumlah orang miskin “ Meledak” dengan suara yang keras, dimana terdapat hampir tiga kali lipat pertambahannya dari angka resmi pemerintah yang telah diumumkan.

Apapun yang menjadi indikator yang digunakan, permasalahan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang sangat tinggi merupakan fakta yang tidak dapat dianggap ringan bagi pemerintah, elit ekonomi, elit politik Indonesia termasuk elit pemerintah daerah.

PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep

mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah.

Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pembangunan ekonomi adalah untuk kesejahteraan rakyat. Bagaimana menjelaskan pembangunan ekonomi tetapi pengangguran dan kemiskinan masih berkelana di tengah masyarakat banyak? Bagi Rostow (1960), pembangunan ekonomi akan sustainable bila kemajuan industri dan jasa didukung maju pertanian, sektor penyerap terbesar lapangan kerja. Kemiskinan terkait lapangan kerja. Penduduk miskin perdesaan lebih besar dari perkotaan. Jumlah dan persentase penduduk miskin periode 1996–2009 berfluktuasi dari tahun ke tahun:

Penduduk miskin di perdesaan umumnya petani. Menurunkan angka kemiskinan, selain menitikberatkan

pertumbuhan ekonomi, juga harus menerapkan pemerataan distribusi pendapatan yang baik melalui sektor pertanian. Anne Booth dan Firdaus (Effect of Price and Market Reform on the Poverty Situation of Rural Communities and Firm Families, 1996) menyatakan penyebab kemiskinan adalah keterbatasan penduduk mengakses pasar, fasilitas publik dan kredit.

Jhingan (2002) menyebut faktor demografi berpengaruh pada kemiskinan. Pertumbuhan penduduk pesat memperberat tekanan pada lahan, pengangguran dan memicu kemiskinan. Pertambahan penduduk berkurang, kemiskinan juga berkurang (teori pertumbuhan penduduk berbeda di negara maju dan berkembang, lihat teori modern economy dan neoclasical economy). Modal dan penguasaan teknologi dapat mengentaskan kemiskinan (Solow Growth Theory). Di sektor pertanian, agenda selain atasi kemiskinan, kesenjangan dan kesempatan kerja, inventarisasi dan ekspor, juga revitalisasi pertanian dan pedesaan. Pembangunan pertanian menciptakan kesempatan kerja, dan mengentaskan kemiskinan, menjadi penyedia lapangan pekerjaan yang besar.

Investasi Pertanian

World Development Report (WDR) terbaru Bank Dunia, terkait pertanian dan kemiskinan pedesaan, menyatakan bahwa investasi sektor pertanian merupakan cara terbaik mengatasi kemiskinan di pedesaan negara berkembang. Investasi lebih besar di sektor pertanian merupakan langkah vital bagi kesejahteraan 600 juta penduduk miskin di negara-negara tersebut. Laporan Agriculture for Development tersebut mengungkapkan, dunia akan gagal mencapai target pengurangan hingga setengah penduduk dunia dari tingkat kemiskinan.

Persoalan utama dalam pembangunan pertanian adalah lahan dan air. Dalam dekade terakhir luas lahan pertanian 17,19% dari total lahan terdiri 4,08%

areal perkebunan; 4,07% lahan sawah; 2,83% pertanian lahan kering dan 6,21% ladang berpindah. Tingkat pemanfaatan lahan sangat bervariasi antar daerah. Perkembangan luas lahan pertanian, terutama sawah dan lahan kering (tegalan), sangat lambat

Penyebab Kegagalan

Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan Di Kabupaten Sidrap, Faktor Pertama, program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin, bantuan langsung tunai (BLSM/BLT) dan program jaring pengaman sosial lainnya untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.

Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal. Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil

Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN.

Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada kenyataannya, data dan informasi seperti ini tidak akan dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara besar yang mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya, maupun bentuk ekonomi yang berlaku secara lokal. Bisa saja terjadi bahwa angka - angka kemiskinan tersebut tidak realistis untuk kepentingan lokal, dan bahkan bisa membingungkan pemimpin local (pemerintah kabupaten/kota).

Secara konseptual, data makro yang dihitung BPS selama ini dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) pada dasarnya (walaupun belum sempurna) dapat digunakan untuk memantau perkembangan serta perbandingan penduduk miskin antar daerah. Namun, data makro tersebut mempunyai keterbatasan karena hanya bersifat indikator dampak yang dapat digunakan untuk target sasaran geografis, tetapi tidak dapat digunakan untuk target sasaran individu rumah tangga atau keluarga miskin. Untuk target sasaran rumah tangga miskin, diperlukan data mikro yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan secara lokal, bukan secara agregat seperti melalui model-model ekonometrik.

Belum memadai

Dalam membangun suatu sistem pengelolaan informasi yang berguna untuk kebijakan pembangunan kesejahteraan daerah kabupaten Sidrap, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah kabupaten Sidrap dalam penyediaan dana secara berkelanjutan.

Dengan adanya dana daerah untuk pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibat dari kebijakan yang salah arah, dan sebaliknya membantu mempercepat proses pembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan.

Keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi statistik tersebut bahkan bisa jauh lebih besar dari biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan data tersebut. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik lokal maupun nasional atau internasional, agar penyaluran dana dan bantuan yang diberikan ke masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Ketersediaan informasi tidak selalu akan membantu dalam pengambilan keputusan apabila pengambil keputusan tersebut kurang memahami makna atau arti dari informasi itu. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis dalam hal penggunaan informasi untuk manajemen. Sebagai wujud dari pemanfaatan informasi untuk proses pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan pembangunan di daerah, diusulkan agar dilakukan pemberdayaan pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pemanfaatan informasi untuk kebijakan program.

Kegiatan ini dimaksudkan agar para pengambil keputusan, baik pemerintah daerah, dinas-dinas pemerintahan terkait, perguruan tinggi, dan para LSM, dapat menggali informasi yang tepat serta menggunakannya secara tepat untuk membuat kebijakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai.

Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengelolaan informasi yang menghasilkan segala bentuk informasi untuk keperluan pembuatan kebijakan

dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai. Perlu pembentukan tim teknis yang dapat menyarankan dan melihat pengembangan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah. Pembentukan tim teknis ini diharapkan mencakup pemerintah daerah dan instansi terkait, pihak perguruan tinggi, dan peneliti lokal maupun nasional, agar secara kontinu dapat dikembangkan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disadari bahwa walaupun kebutuhan sistem pengumpulan data yang didesain, diadministrasikan, dianalisis, dan didanai pusat masih penting dan perlu dipertahankan, sudah saatnya dikembangkan pula mekanisme pengumpulan data untuk kebutuhan komunitas dan kabupaten. Mekanisme pengumpulan data ini harus berbiaya rendah, berkelanjutan, dapat dipercaya, dan mampu secara cepat merefleksikan keberagaman pola pertumbuhan ekonomi dan pergerakan sosial budaya di antara komunitas pedesaan dan kota, serta kompromi ekologi yang meningkat.

Strategi ke depan Untuk itu, revitalisasi pertanian, pengembangan lahan pertanian ditempuh:

1. Reformasi agraria meningkatkan akses petani terhadap lahan dan air (irigasi) serta meningkatkan rasio luas lahan per kapita
2. Pengendalian konversi lahan pertanian dan pencadangan lahan abadi untuk pertanian.
3. Fasilitasi terhadap pemanfaatan lahan (pembukaan lahan pertanian baru), Menurut WDR, pertumbuhan PDB dari pertanian empat kali lebih efektif kurangi kemiskinan dibandingkan pertumbuhan dari luar sektor ini.
4. Penciptaan suasana yang kondusif untuk agroindustri (penciptaan nilai tambah dari produk pertanian) sebagai penyedia lapangan kerja dan peluang peningkatan pendapatan serta kesejahteraan keluarga petani.

Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal.

Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidrap,

Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga.

Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemaha-man gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Sidrap dengan dibantu para peneliti perlu mengembangkan sendiri sistem pemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang. Para peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan lainnya.

Kesimpulan

Besarnya penduduk masih miskin dan menganggur yang tinggal di kabupaten Sidrap khususnya diwilayah perdesaan, menjadikan sektor pertanian sebagai sektor kunci pembangunan.

Produktivitas dan kualitas sektor pertanian adalah 2 hal yang harus

dibenhahi sehingga sektor pertanian menjadi andalan mengatasi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan. Perlu master plan komprehensif dan *Road Map* dari lembaga terkait untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sektor pertanian ini.

Luas lahan pertanian produktif yang mengecil menurunkan produktivitas. Reformasi UU Agraria harus dilakukan. Kompensasi terhadap peralihan lahan produktif harus berkorelasi terhadap peningkatan produktivitas pertanian.

Subsidi pupuk dan saparodi lainnya seharusnya meningkatkan produktivitas. Implementasi yang efisien dan efektif harus terus diupayakan.

Kualitas produktivitas dan keterbatasan lahan bisa diatasi dengan anggaran Riset dan Development Pertanian menemukan varian produk, sistem produksi, pemasaran, & industri sektor pertanian. Investasi pertanian harus didorong.

Pentingnya sektor pertanian bagi pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengangguran di kabupaten Sidrap, perlu monitoring intensif bagi perencanaan program dan pelaksanaan program pertanian oleh lembaga terkait sehingga pencapaian sasaran target tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin , “ 2005. “ *Pembangunan Pertanian : Paradigma, Kebijakan dan strategi Revitalisasi*, Jakarta, Grasindo.

Bappeda, 2013, “Laporan Akhir : *Kajian Pembangunan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan*. Cv Opal Plan 86. Makassar.

Indef “ 2006. “ ***Kajian Kebijakan Tataniaga Beras*** Laporan Akhir” : Kerjasama Badan LitBang, Dep. Perdagangan dan INDEF.

LPEM-UI, 2005 : ***Road Map Menuju Ketahanan Pangan : Peran Strategis Pembangunan Pertanian dan Perdesaan,*** Jakarta LPEM – UI.

Peluso, Nancy Lee, 1994. “ ***Rich Forests, Poor Resource Control and Resistance in Java.*** Berkeley : University Of California Press.

Misbahuddin, 2000, “ ***Mempertahankan Kabupaten Sidrap Sebagai Lumbung Beras Berbasis Agribinis***” Tesis. PPS UNHAS. Tidak dipublikasi.

World Bank, 2006 “ ***Making the New Indonesia Work For the Poor.*** Washington. D.C. The World Bank

****) Penulis adalah Dosen Tetap STIM LPI Makassar dan Pengurus Ikatan Sarjana Asal (ISA) Sidrap.***